

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gerakan perempuan telah menjadi isu yang menarik untuk dikaji dengan meninjau dari dinamika proses sejarahnya di dunia. Dalam penelitian ini memfokuskan gerakan perempuan yang terjadi di negara Korea Selatan sebagai bagian dari benua Asia. Para aktivis pergerakan perempuan di Asia memiliki perspektif tersendiri dalam bentuk dan arah pergerakannya yang mana disebabkan oleh faktor sejarah dan budaya di masing-masing negaranya. Merujuk kepada Roces dan Edward (2010, hlm. 1) menyatakan bahwa secara kolektif, negara-negara di Asia memiliki kesamaan yaitu rasa senasib dan penderitaan akibat adanya penjajahan. Oleh karena itu, gerakan perempuan di Asia memiliki ciri khas yang bersifat nasionalis dan anti-kolonialis sebagai reaksi yang timbul dari pengalaman patriarki ketika masa penjajahan. Hal ini terutama gerakan perempuan di Korea Selatan pada abad ke-20 yang terjadi karena latar belakang historisnya saat masa pendudukan Jepang di Semenanjung Korea. Kala itu wanita Korea mengalami dampak dari kebijakan Kekaisaran Jepang yang membentuk sistem *military 'comfort women'* atau 'wanita penghibur' militer. Sistem yang dibuat oleh Kekaisaran Jepang ini melibatkan wanita Korea dalam melayani Tentara Kwantung atau pasukan militer Jepang di Manchuria selama masa peperangan (1932-1945).

Merujuk kepada Yun Chung-Ok (dalam Chai, 1993, hlm. 68) mengemukakan bahwa berdasarkan terminologinya, Jepang menyebut 'wanita penghibur' militer sebagai *jūgun'ianfu*. Istilah tersebut dipakai selama Perang Pasifik (1941-1945) hingga setelah masa peperangan Jepang berakhir. Sementara itu orang Korea sendiri cenderung menyebutnya sebagai *jeongshindae* atau 'korps relawan' wanita Korea daripada Bahasa Koreanya *jonggun wianbu*. Istilah *jeongshindae* sering disalahartikan sebagai sebutan untuk wanita Korea yang bekerja menjadi buruh pabrik, manufaktur, dan rumah sakit. Namun sebenarnya terdapat istilah lain mengenai hal ini yaitu *geunro jeongshindae*. Untuk menghindari ambiguitas, *Korean Council for Women Drafted by Japan for Sexual Slavery* (yang sekarang disebut sebagai *Korean Council*), memutuskan bahwa istilah *jeongshindae* bermakna sama dengan *jūgun'ianfu* namun lebih dikhususkan

kepada wanita Korea yang dipaksa dan diperbudak menjadi pekerja seks. Sementara untuk perempuan yang hanya bekerja sebagai buruh disebut sebagai *geunro jeongshindae*. Adapun berkaitan dengan judul penelitian ini, berdasarkan pada tinjauan terminologi tersebut maka peneliti mengangkat istilah *jeongshindae* sebagai isu yang tengah diupayakan penyelesaiannya dalam gerakan perempuan di Korea Selatan pada awal abad ke-20.

Dalam menjelaskan mengenai permasalahan yang menambah urgensi diangkatnya penelitian mengenai gerakan perempuan di Korea Selatan, terkait dengan isu *jeongshindae* dapat dianalisis dalam pendekatan sistem. Hal ini juga dapat menjelaskan mengenai keberlangsungan eksistensinya yang terpaut sembilan tahun lamanya dari mulai Insiden Shanghai 1932 hingga Perang Pasifik (1941-1945). Sistem dapat dikaji melalui melalui teori struktural fungsional. Talcott Parsons (dalam Turama, 2020, hlm. 61) memaparkan mengenai beberapa persyaratan bertahannya suatu sistem. Diantara persyaratan yang berkaitan dengan konteks *jūgun'ianfu* dapat dilihat bahwa sistem ini terstruktur yaitu mengatur mulai dari rekrutmen, mutasi, perbekalan, dan pemeriksaan fisik secara rutin serta mendapat dukungan dari sistem lain yaitu dari pemerintah Kekaisaran Jepang sendiri yang melegalkannya.

Dukungan tersebut dapat dilihat melalui pernyataan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo (1941-1944) dalam konferensi pers yang diadakan setelah membentuk kabinetnya pada 8 Oktober 1941. Ia menanggapi pertanyaan seorang jurnalis dengan mengatakan, “Dari perspektif Asia, wanita adalah barang strategis, dan mereka adalah materi kemenangan yang tak tergantikan” (Mingzhe, 2017, hlm. 18). Merujuk kepada pernyataan Hideki Tojo, dapat dianalisis bahwa jiwa zaman perangkat militer dan pemerintahan Jepang kala itu meyakini bahwa eksploitasi wanita dapat menghantarkan mereka pada kemenangan perang. Di dalam perang, tidak hanya tenaga fisik saja yang terkuras namun dapat juga mempengaruhi mental pasukan militer Jepang. Oleh karena itu, *jūgun'ianfu* dapat menghilangkan efek stres yang dirasakan tentara Jepang dengan memenuhi kepuasan seksualnya. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah perempuan yang mereka eksploitasi itu mau dan rela melakukannya? Pada kenyataannya, melihat dari cara perekrutannya yang memaksakan dapat diketahui bahwa tidak ada *consent* dari para

perempuan tersebut. Bahkan menurut Yamashita (dalam Kristi, 2016, hlm. 324), *jūgun'ianfu* merupakan kejahatan transnasional seksual yang sangat besar karena melibatkan perempuan dari berbagai negara pendudukan Jepang. Seperti dijelaskan sebelumnya, *jūgun'ianfu* merupakan produk budaya Jepang. Hal ini juga dapat dilihat sebagai wujud hegemoni budaya Jepang di negara-negara pendudukannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan dalam sistem ini.

Sebelum Jepang menciptakan *jūgun'ianfu* yang bermula ketika tahun 1932, sebenarnya telah ada hukum internasional yang melarang perbudakan yaitu termaktub dalam Konvensi Perbudakan 1926 “Perbudakan adalah status atau kondisi seseorang yang menjalankan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan (League of Nations, 1926)”. Dengan demikian, praktik *jūgun'ianfu* dinilai bertentangan dengan berbagai aspek tersebut sehingga menambah urgensi diangkatnya penelitian ini. Praktik *jūgun'ianfu* yang termasuk kepada kekerasan seksual, jika dikaitkan dengan konteks saat ini, hal tersebut masih terjadi namun tidak teratur secara sistemik melainkan dalam bentuk kasus-kasus kecil. Meskipun begitu, dua kejadian serupa pada waktu yang berbeda ini memiliki satu kesamaan yaitu korban yang cenderung memilih untuk bungkam ketika sedang mengalaminya, yang mana hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu. Ketika telah memiliki keberanian untuk memperjuangkan keadilan pun di dalamnya tentu mengalami dinamika. Khususnya dalam fokus penelitian ini akan menelusuri mengapa isu *jeongshindae* seakan bungkam hampir setengah abad lamanya. Sampai pada pergerakannya aktor gerakan *jeongshindae* berhadapan dengan sistem pemerintah Korea Selatan, Jepang, dan organisasi internasional.

Gerakan *jeongshindae* sendiri yang tuntutannya berasal dari korban dan Organisasi Non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) sebagai komunitas kecil marginal serta kurang berpengaruh, dalam prosesnya berkembang menjadi suatu gerakan besar dan membawa perubahan di beberapa aspek. Selain itu, dalam gerakannya mereka juga mengandalkan aset intelektual yakni fakta sejarah mengingat permasalahan terjadi ketika masa pendudukan Jepang di Korea yang menerapkan sistem ‘wanita penghibur’ militer atau *jūgun'ianfu*. Sebenarnya *jūgun'ianfu* tidak hanya di Korea namun juga merambah ke negara-negara

pendudukan Jepang lainnya termasuk Indonesia. Namun pemilihan negara Korea Selatan peneliti pertimbangkan berdasarkan pada kekhasan karakteristik pergerakannya yang masif dan hubungan-hubungan kompleks lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hartono dan Juliantoro (1997, hlm. 181) bahwa dukungan yang luas di Indonesia hingga tahun 1996 tidak pernah muncul. Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Korea Selatan, Filipina ataupun negara lain. Dukungan dari masyarakat begitu besar, aksi-aksi massa, rapat-rapat umum, konferensi, seminar terbuka, aksi-aksi publikasi seperti penerbitan buku, poster, pamflet-pamflet begitu menyebar dan menjadikan masalah *jūgun'ianfu* sebagai sebuah wacana yang hidup, dan sekaligus menjadi hujan anak panah yang menyerbu pemerintah Jepang.

Di Korea Selatan sendiri dukungan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun sebagai gerakan transnasional, organisasi gerakan *jeongshindae* memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi advokasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Min (2021, hlm. 82) bahwa berbagai organisasi advokasi yang terhubung ini diantaranya organisasi-organisasi advokasi Jepang, organisasi negara-negara bekas pendudukan Jepang di Asia yang terdapat korban sistem *jūgun'ianfu* yang juga belajar dari pergerakan di Korea Selatan, serta organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional seperti Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dukungan juga diberikan oleh organisasi-organisasi yang diinisiasi oleh imigran atau keturunan orang Korea di negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Salah satu faktornya ialah karena imigran Korea cenderung memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini sebagaimana menurut Min dan Kim (2009, hlm. 777) bahwa imigran Korea di New York memiliki tingkat identitas nasional dan kesetiaan terhadap tanah airnya yang lebih tinggi daripada imigran China dan India. Dukungan imigran Korea terhadap gerakan *jeongshindae*, sebagaimana istilah yang dikemukakan Anderson (1998) dalam hal ini dapat dikatakan sebagai nasionalisme jarak jauh. Tingginya nasionalisme imigran Korea yang diwujudkan dalam dukungan tersebut dapat disebabkan oleh berkembangnya sikap penolakan terhadap pendudukan Jepang (1910-1945).

Hubungan kompleks lainnya yang menjadi pertimbangan ialah diantaranya terkait sentimen negatif antara Korea Selatan dan Jepang, namun disisi lain kedua

negara ini memiliki kepentingan bersama sehingga mempengaruhi pasang surut pergerakan *jeongshindae*. Orang Korea memiliki sentimen yang disebut sebagai anti-Jepang, seperti halnya imigran Korea, sikap penolakan terhadap pendudukan Jepang juga membentuk identitas nasional masyarakat Korea Selatan pada umumnya. Sementara itu, nasionalisme bagi Jepang ditunjukkan oleh konservatif neo-nasionalis yakni dengan sikap yang mempertahankan dari serangan yang dapat membuat buruk citra negaranya, utamanya menolak fakta sejarah pendudukan Jepang khususnya di Korea. Dalam hal ini bentuk pertahanannya ialah dengan menyesuaikan ingatan sejarah Jepang sesuai dengan kepentingan nasionalnya, yakni dengan menuliskan ulang sejarahnya untuk menciptakan memori kolektif yang menyangkal kolonialisme (Mallet, 2020). Sentimen antara kedua negara ini menurut (Sakaki, 2019, hlm. 2) bagi masyarakat Korea Selatan modern, Jepang adalah titik acuan negatif utamanya dan sikap anti-Jepang membentuk komponen integral nasionalisme Korea Selatan. Kemudian bagi kaum nasionalis sayap kanan Jepang secara khusus merasa bahwa bangsa yang mereka banggakan menerima kritik berlebihan atas masa lalunya, terutama dari Korea. Permasalahan perbedaan pandangan historis ini menjadi hambatan bagi Amerika Serikat di kedua negara ini yang hendak menanamkan kepentingannya dalam menjaga ancaman dari China dan Korea Utara dalam aspek keamanan dan ekonomi. Dalam mewujudkan hal tersebut, Amerika Serikat menginginkan hubungan normalisasi antara kedua negara ini. Dengan demikian, pengaruh Amerika Serikat menambah kompleks isu *jeongshindae* sehingga membuat karakteristik yang berbeda dengan kasus korban sistem *jūgun'ianfu* di negara lainnya.

Meninjau berbagai permasalahan yang mengangkat urgensi penelitian gerakan *jeongshindae*, apakah dalam prosesnya mengalami perkembangan yang mengarah kepada keberhasilan atau kegagalan? Berdasarkan berbagai kegelisahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan terperinci yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan tajuk “Gerakan Perempuan di Korea Selatan 1990-2015: Penyelesaian Isu *Jeongshindae*”.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus penelitian akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

- 1.2.1 Apa latar belakang kemunculan gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan?
- 1.2.2 Bagaimana proses terjadinya gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan?
- 1.2.3 Mengapa masih terjadi konflik ketika Jepang mengambil tindakan pertanggungjawaban sebagai respon dari gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan?
- 1.2.4 Bagaimana akhir penyelesaian isu *jeongshindae* di Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mencapai beberapa tujuan yaitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Berikut beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

- 1.3.1 Menjelaskan latar belakang kemunculan gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan.
- 1.3.2 Mendeskripsikan proses terjadinya gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan.
- 1.3.3 Menguraikan konflik yang terjadi saat Jepang mengambil tindakan pertanggungjawaban sebagai respon dari gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan.
- 1.3.4 Memaparkan akhir penyelesaian isu *jeongshindae* di Korea Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada sub-bab ini akan menjelaskan terkait manfaat dalam penelitian. Adapun manfaat penelitian terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis. Penelitian ini ditunjukkan agar bermanfaat untuk bidang ilmu sejarah dan manfaat dan pendidikan sejarah. Untuk selengkapnya akan dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Teori feminisme postkolonial dapat digunakan dalam bidang ilmu sejarah yakni untuk mengkaji kondisi penyintas sebagai perempuan *subaltern* dan kaum marginal serta dominasi patriarki dalam hipermaskulinitas negara

sebagai latar belakang terjadinya gerakan perempuan yang menyelesaikan isu perempuan.

- 2) Teori jaringan advokasi transnasional dapat digunakan dalam bidang ilmu sejarah yakni untuk mengkaji peristiwa sejarah yang membahas mengenai gerakan perempuan yang menyelesaikan isu perempuan dengan menganalisis langkah-langkah dan polanya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadi tambahan referensi atau dasar pengembangan penelitian mengenai isu *jeongshindae* bagi mahasiswa maupun peneliti lainnya.
- 2) Dalam dunia pendidikan sejarah, dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya materi dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan Kompetensi Dasar 3.6 yaitu “Menganalisis pengaruh PD I dan PD II terhadap kehidupan politik, sosial-ekonomi dan hubungan internasional (LBB, PBB), pergerakan nasional dan regional”.

1.5 Struktur Organisasi

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang penelitian yang membahas mengenai sejarah *jūgun'ianfu* dan urgensi diangkatnya topik gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan. Selain itu terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat atau signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

1.5.2 Bab II Kajian Pustaka

Pada bagian ini peneliti memakai pendekatan interdisipliner untuk mengetahui struktur terdalam peristiwa guna memperkuat kausalitas dan melengkapi keutuhan penulisan sejarah gerakan *jeongshindae* di Korea Selatan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teori feminisme postkolonial dan jaringan advokasi transnasional untuk mempertajam analisis peristiwa yang sedang dikaji. Di dalam bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya.

1.5.3 Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menggunakan prosedur dan metode penelitian sejarah, yaitu terdiri dari tahapan; 1) heuristik, 2) kritik sumber, dan 3) historiografi. Teknik penelitiannya menggunakan studi pustaka khususnya dalam pencarian dan

pengumpulan sumber atau pada tahap heuristik. Kemudian dilakukan kritik eksternal dan internal terhadap sumber yang telah dikumpulkan. Setelah itu, dilakukan interpretasi dan kontruksi hingga menjadi suatu historiografi atau penulisan sejarah yang utuh.

1.5.4 Bab IV Gerakan *Jeongshindae*

Pada bab pembahasan ini merupakan uraian atas jawaban-jawaban dari rumusan masalah mengenai gerakan *jeongshindae*. Selain itu, pembahasan ini juga disusun berdasarkan kajian dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan dengan kata lain melalui tahapan dalam metode penelitian sejarah.

1.5.5 Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab terakhir ini terdiri dari simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Selain itu akan dijelaskan pula hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian terkait gerakan *jeongshindae*.